



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 152);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 165);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan- LRA	Rp. 1.257.703.239.549,02	
b. Belanja	Rp. 1.074.607.738.597,18	
c. Transfer	Rp. 192.350.378.688,00	
d. Surplus/Defisit- LRA		Rp. (9.254.877.736,16)
e. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 60.472.131.308,21	
- Pengeluaran	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>	
		Rp. 58.472.131.308,21
f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		Rp. 49.217.253.572,06

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diurai sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp. (38.893.598.593,98) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.296.596.838.143,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 1.257.703.239.549,02</u>	
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp. (38.893.598.593,98)</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp. (86.801.335.010,82) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.161.409.073.608,00	
2. Realisasi	Rp. 1.074.607.738.597,18	
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp. (86.801.335.010,82)</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp. (994.155.924,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp. 193.344.534.612,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 192.350.378.688,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp. (994.155.924,00)</u>

d. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit)-LRA sebesar Rp. 48.901.892.340,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Surplus/ (defisit) setelah perubahan	Rp. (58.472.131.308,21)
2. Realisasi	<u>Rp. (9.254.877.736,16)</u>
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp. 48.901.892.340,85</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 315.361.231,21 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 58.156.770.077,00
2. Realisasi	<u>Rp. 58.472.131.308,21</u>
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp. 315.361.231,21</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 49.217.253.572,06 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Sisa Lebih/Kurang setelah perubahan	Rp. 0,00
2. Realisasi	<u>Rp. 49.217.253.572,06</u>
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp. 49.217.253.572,06</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 60.472.140.076,80
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp. 60.472.131.308,21
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan	Rp. 49.217.253.572,06
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp. (8.768,59)
e. Lain-lain	<u>Rp. 0,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp. 49.217.253.572,06</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 2.168.403.950.576,75
b. Jumlah kewajiban	Rp. 11.830.809.546,86
c. Jumlah ekuitas dana	<u>Rp. 2.156.573.141.029,89</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional	Rp. 1.159.251.868.350,52
b. Beban dari kegiatan operasional	Rp. 1.061.621.309.422,37
c. Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp. (11.291.535.865,02)
d. Pos luar biasa	<u>Rp. (3.177.294.200,00)</u>
e. Surplus/(defisit)-LO	<u>Rp. 83.161.728.863,12</u>

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp. 61.357.634.375,63
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 209.369.331.787,64
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (220.624.209.523,80)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. (817.270.633,87)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	<u>Rp. 49.285.486.005,61</u>

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.073.918.032.660,71
-----------------	--------------------------

b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	83.161.728.863,13
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
f. Lain-Lain	Rp.	(506.620.493,94)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	<u>2.156.573.141.029,89</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 21 Juli 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 170

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 03/130.2/PES/2022**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**

PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

**Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005**

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
5.4.11.7-01.0-00.0-00.35	KECAMATAN ADILUWIH	2.210.359.608,00	2.158.290.292,00	(52.069.316,00)	97,64
5.4.11.7-01.0-00.0-00.35.1	BELANJA OPERASI	2.187.459.608,00	2.135.390.292,00	(52.069.316,00)	97,62
5.4.11.7-01.0-00.0-00.35.1.1	Belanja Pegawai	1.600.159.608,00	1.548.090.292,00	(52.069.316,00)	96,75
5.4.11.7-01.0-00.0-00.35.1.2	Belanja Barang dan Jasa	587.300.000,00	587.300.000,00	-	100,00
5.4.11.7-01.0-00.0-00.35.2	BELANJA MODAL	22.900.000,00	22.900.000,00	-	100,00
5.4.11.7-01.0-00.0-00.35.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.900.000,00	22.900.000,00	-	100,00
5.4.11.7-01.0-00.0-00.36	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	1.832.886.063,00	1.717.806.405,00	(115.079.658,00)	93,72
5.4.11.7-01.0-00.0-00.36.1	BELANJA OPERASI	1.782.886.063,00	1.690.306.405,00	(92.579.658,00)	94,81
5.4.11.7-01.0-00.0-00.36.1.1	Belanja Pegawai	1.218.696.063,00	1.135.515.759,00	(83.180.304,00)	93,17
5.4.11.7-01.0-00.0-00.36.1.2	Belanja Barang dan Jasa	564.190.000,00	554.790.648,00	(9.399.354,00)	98,33
5.4.11.7-01.0-00.0-00.36.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	27.500.000,00	(22.500.000,00)	55,00
5.4.11.7-01.0-00.0-00.36.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	27.500.000,00	(22.500.000,00)	55,00
5.4.11.7-01.0-00.0-00.37	KECAMATAN AMBARAWA	1.853.880.802,00	1.759.897.945,00	(93.982.857,00)	94,93
5.4.11.7-01.0-00.0-00.37.1	BELANJA OPERASI	1.813.819.302,00	1.725.559.945,00	(88.259.357,00)	95,13
5.4.11.7-01.0-00.0-00.37.1.1	Belanja Pegawai	1.277.855.166,00	1.203.090.433,00	(74.764.733,00)	94,15
5.4.11.7-01.0-00.0-00.37.1.2	Belanja Barang dan Jasa	535.964.136,00	522.469.512,00	(13.494.624,00)	97,48
5.4.11.7-01.0-00.0-00.37.2	BELANJA MODAL	40.061.500,00	34.338.000,00	(5.723.500,00)	85,71
5.4.11.7-01.0-00.0-00.37.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.061.500,00	34.338.000,00	(5.723.500,00)	85,71
5.4.11.7-01.0-00.0-00.38	KECAMATAN PARDASUKA	2.141.933.351,00	2.030.872.184,00	(111.061.167,00)	94,81
5.4.11.7-01.0-00.0-00.38.1	BELANJA OPERASI	2.108.053.351,00	1.996.992.184,00	(111.061.167,00)	94,73
5.4.11.7-01.0-00.0-00.38.1.1	Belanja Pegawai	1.478.223.351,00	1.409.616.490,00	(68.606.861,00)	95,36
5.4.11.7-01.0-00.0-00.38.1.2	Belanja Barang dan Jasa	629.830.000,00	587.375.694,00	(42.454.306,00)	93,26
5.4.11.7-01.0-00.0-00.38.2	BELANJA MODAL	33.880.000,00	33.880.000,00	-	100,00
5.4.11.7-01.0-00.0-00.38.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.880.000,00	33.880.000,00	-	100,00
5.4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	6.070.645.084,00	5.935.993.152,00	(134.651.932,00)	97,78
5.4.12.8-01.0-00.0-00.29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.070.645.084,00	5.935.993.152,00	(134.651.932,00)	97,78
5.4.12.8-01.0-00.0-00.29.1	BELANJA OPERASI	6.070.645.084,00	5.935.993.152,00	(134.651.932,00)	97,78
5.4.12.8-01.0-00.0-00.29.1.1	Belanja Pegawai	1.959.121.154,00	1.907.451.498,00	(51.669.656,00)	97,36
5.4.12.8-01.0-00.0-00.29.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.451.229.530,00	1.388.247.254,00	(62.982.276,00)	95,66
5.4.12.8-01.0-00.0-00.29.1.5	Belanja Hibah	2.660.294.400,00	2.640.294.400,00	(20.000.000,00)	99,25
(SURPLUS/DEFISIT)		(58.156.770.077,00)	(9.254.877.736,15)	48.901.892.340,85	15,91

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.943.957.314,00	37.368.839.493,15	85,04	31.489.257.545,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.270.796.119,00	87.795.669.360,65	89,34	76.176.474.575,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.575.443.400,00	5.167.302.800,00	92,68	9.384.430.171,00
Belanja Modal Aset Lainnya	14.090.000,00	-	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.896.025.630,00	3.193.294.200,00	65,22	11.012.041.164,00
Belanja Tidak Terduga	4.896.025.630,00	3.193.294.200,00	65,22	11.012.041.164,00
BELANJA TRANSFER	193.344.534.612,00	192.350.378.688,00	99,49	190.837.931.512,00
Belanja Bagi Hasil	4.249.709.312,00	3.500.632.849,00	82,37	2.246.015.612,00
Belanja Bantuan Keuangan	189.094.825.300,00	188.849.745.839,00	99,87	188.591.915.900,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(58.156.770.077,00)	(9.254.877.736,16)	15,91	17.542.412.457,18
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.472.140.077,00	60.472.131.308,21	100,00	44.929.727.619,62
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.472.140.077,00	60.472.131.308,21	100,00	44.929.727.619,62
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.315.370.000,00	2.000.000.000,00	86,38	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	2.315.370.000,00	2.000.000.000,00	86,38	2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	58.156.770.077,00	58.472.131.308,21	100,54	42.929.727.619,62
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	49.217.253.572,06	-	60.472.140.076,80

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tak Terduga		Belanja Transfer			
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	253.388.050,00	253.388.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	253.388.050,00	253.388.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	29.989.150,00	29.989.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	223.398.900,00	223.348.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	640.843.900,00	640.843.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	640.843.900,00	640.843.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	640.843.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.129.231.024,00	2.109.231.024,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.129.231.024,00	2.109.231.024,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.129.231.024,00	2.109.231.024,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	27.385.250,00	27.385.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	27.385.250,00	27.385.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27.385.250,00	27.385.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	434.346.850,00	420.652.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	434.346.850,00	420.652.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11.294.400,00	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	423.052.450,00	417.452.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		906.351.162.210,00	852.790.234.873,38	250.161.885.768,00	218.624.209.523,80	4.896.025.630,00	3.193.294.200,00	193.344.534.612,00	192.350.378.688,00		

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum		
								Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%			
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	34.262.275,00	34.262.275,00	-	100,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.262.275,00	34.262.275,00	-	100,00	
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.955.000,00	149.820.079,00	(134.921,00)	99,91		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	149.955.000,00	149.820.079,00	(134.921,00)	99,91		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.955.000,00	149.820.079,00	(134.921,00)	99,91	
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.999.000,00	18.900.000,00	(99.000,00)	99,48		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.999.000,00	18.900.000,00	(99.000,00)	99,48		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	18.999.000,00	18.900.000,00	(99.000,00)	99,48		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.999.000,00	18.900.000,00	(99.000,00)	99,48	
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.600.000,00	130.096.045,00	(1.503.955,00)	98,86		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.300.000,00	107.796.045,00	(1.503.955,00)	98,62		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	109.300.000,00	107.796.045,00	(1.503.955,00)	98,62		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.300.000,00	107.796.045,00	(1.503.955,00)	98,62	
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.29.00	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
								Jumlah Belanja	6.070.645.084,00	5.935.993.152,00	(134.651.932,00)	97,78		
								Total Surplus/(Defisit)	(6.070.645.084,00)	(5.935.993.152,00)	134.651.932,00	97,78		
0	00	8.01.0.00.0.00.29.00	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN						
								Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-					
								Jumlah Penerimaan Pengeluaran	-					
								Pembiayaan Netto	-					
								Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	(8.070.645.084,00)	(5.935.993.152,00)				

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 TAHUN ANGGARAN 2021
 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	60.472.140.076,80	44.929.780.619,62
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	60.472.131.308,21	44.929.727.619,62
3	Subtotal (1 - 2)	8.768,59	53.000,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.217.253.572,06	60.472.140.076,80
6	Subtotal (3 + 4)	49.217.262.340,64	60.472.193.076,80
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(8.768,59)	(53.000,00)
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Lain - lain)	0,00	0,00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	0,00	60.472.140.076,80

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

NO	URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
39	Beban Bantuan Sosial	1.425.000.000,00	1.798.000.000,00	(373.000.000,00)	(20,75)
40	Beban Penyisihan Piutang	95.927.639,98	812.442.635,44	(716.514.995,46)	0,00
41	Beban Lain-Lain	0,00	46.815.103.556,82	(46.815.103.556,82)	(100,00)
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi	150.387.146.961,73	140.269.173.130,98	10.117.973.830,75	7,21
43	Jumlah Beban Operasi (34 s.d 42)	997.368.725.334,37	998.810.055.406,46	(1.441.330.072,09)	(0,14)
44					
45	BEBAN TRANSFER				
46	Beban Bagi Hasil	3.500.632.849,00	2.246.015.612,00	1.254.617.237,00	55,86
47	Beban Bantuan Keuangan	60.751.951.239,00	60.503.748.100,00	248.203.139,00	0,41
48	Jumlah Beban Transfer (46 s.d 47)	64.252.584.088,00	62.749.763.712,00	1.502.820.376,00	56,27
49	JUMLAH BEBAN (43 + 48)	1.061.621.309.422,37	1.061.559.819.118,46	61.490.303,91	56,13
51	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	97.630.558.928,15	(9.885.678.533,84)	107.516.237.461,99	(1.087,60)
52					
53	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
54	SURPLUS NON OPERASIONAL				
55	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00		0,00	0,00
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
59					
60	DEFISIT NON OPERASIONAL				
61	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar -LO	11.291.535.865,02	0,00	11.291.535.865,02	0,00
62	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah Defisit Non Operasional	11.291.535.865,02	0,00	11.291.535.865,02	0,00
65	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(11.291.535.865,02)	0,00	(11.291.535.865,02)	0,00
66					
67	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	86.339.023.063,13	(9.885.678.533,84)	96.224.701.596,97	(973,37)
68					
69	<u>POS LUAR BIASA</u>				
70	PENDAPATAN LUAR BIASA				
71	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
73					
74	BEBAN LUAR BIASA				
75	Beban Tidak Terduga	3.177.294.200,00	0,00	3.177.294.200,00	0,00
76	Jumlah Beban Luar Biasa	3.177.294.200,00	0,00	3.177.294.200,00	0,00
77	POS LUAR BIASA	(3.177.294.200,00)	0,00	(3.177.294.200,00)	0,00
78					
79	SURPLUS/DEFISIT - LO	83.161.728.863,13	(9.885.678.533,84)	93.047.407.396,97	(941,23)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TAHUN ANGGARAN 2021
 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	2.073.918.032.660,71	2.033.402.737.392,49
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	83.161.728.863,13	(9.885.678.533,84)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR:	(506.620.493,94)	50.400.973.802,06
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(506.620.493,94)	50.400.973.802,06
4	EKUITAS AKHIR	2.156.573.141.029,89	2.073.918.032.660,71

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TAHUN ANGGARAN 2021
 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	2.073.918.032.660,71	2.033.402.737.392,49
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	83.161.728.863,13	(9.885.678.533,84)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR:	(506.620.493,94)	50.400.973.802,06
	Koreksi Selisih Revaluasi Asct Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(506.620.493,94)	50.400.973.802,06
4	EKUITAS AKHIR	2.156.573.141.029,89	2.073.918.032.660,71

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

NO	URAIAN	2021	2020
45	ASET LAINNYA		
46	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	89.899.786,00	89.899.786,00
47	Aset Tidak Berwujud	123.970.000,00	0,00
48	Aset Lain-Lain	3.007.234.242,00	7.009.575.842,00
49	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
50	Jumlah Aset Lainnya	3.221.104.028,00	7.099.475.628,00
51	JUMLAH ASET	2.168.403.950.576,75	2.084.217.103.855,79
52	KEWAJIBAN		
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.231.433,55	882.624.298,83
55	Utang Bunga	0,00	0,00
56	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
57	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
58	Utang Belanja	3.675.824.096,96	4.167.654.150,00
59	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.087.754.016,35	5.248.792.746,25
60	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.830.809.546,86	10.299.071.195,08
61	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
62	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
63	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
64	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
65	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
67	JUMLAH KEWAJIBAN	11.830.809.546,86	10.299.071.195,08
68	EKUITAS		
69	EKUITAS	2.156.573.141.029,89	2.073.918.032.660,71
70	JUMLAH EKUITAS	2.156.573.141.029,89	2.073.918.032.660,71
71	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.168.403.950.576,75	2.084.217.103.855,79

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

NO	URAIAN	2021	2020
103	Saldo Awal Kas BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, JKN & BOS	61.357.634.375,63	45.595.668.142,62
104	Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, JKN & BOS terdiri dari : (102 + 103)	49.285.486.005,61	61.357.634.375,63
105	Kas di Bank Lampung	45.014.502.434,64	58.619.607.630,66
106	Piutang PFK	-	-
107	Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan	-	-
108	Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	715.873.379,11
109	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	4.026.532.290,21	1.694.665.956,68
110	Kas di Bendahara JKN	-	-
111	Kas di Bendahara BOS	244.451.280,76	327.487.409,18

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

(dalam rupiah)


No.	OPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	12.910.227.604,03	5.311.037.784,00	2.762.275.731,20	15.458.989.656,83
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Piutang Retribusi Daerah	27.608.628,00	-	-	27.608.628,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Piutang Retribusi Daerah	10.241.112,00	-	-	10.241.112,00
4	Dinas Kesehatan	Piutang Lain-lain (BLUD)	335.686.907,00	13.536.384.296,00	335.686.907,00	13.536.384.296,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Piutang Lain-lain	132.537,02	-	132.537,02	-
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Prov	20.731.132.196,00	30.692.129.468,00	20.731.132.196,00	30.692.129.468,00
	Jumlah		34.015.028.984,05	49.539.551.548,00	23.829.227.371,22	59.725.353.160,83

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2021				
(dalam rupiah)				
No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak Daerah	15.458.989.656,83	4.873.088.663,42	10.585.900.993,41
2	Piutang Retribusi Daerah	37.849.740,00	37.849.740,00	-
3	Piutang Lain-lain	13.536.384.296,00	-	13.536.384.296,00
4	Piutang Bagi Hasil Prov.	30.692.129.468,00	-	30.692.129.468,00
5		-	-	-
Jumlah		59.725.353.160,83	4.910.938.403,42	54.814.414.757,41

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

7



VII PENUTUP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya kemudian dilakukan Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ini kami sampaikan, sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh rakyat/masyarakat Kabupaten Pringsewu


PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2021				
(dalam rupiah)				
No.	OPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2		-	-	-
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
		-	-	-
	Jumlah	-	-	-

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam rupiah)

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2012	PT. BANK LAMPUNG	Perda	Saham	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	2.000.000.000,00	11.500.000.000,00	-	-	-	11.500.000.000,00
2.	2012	PDAM WAY SEKAMPUNG		Saham	9.993.206.545,47	7.610.836.757,00	(371.095.326,00)	7.239.741.431,00	-	-	-	7.239.741.431,00
3.												
4.												
5.												
6.												
Dst												
Jumlah												18.739.741.431,00

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	14.431.622.466,07	1.985.726.734,97	806.209.891,09	15.611.139.309,95
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.107.211.704,00	58.442.800,00	7.984.400,00	2.157.670.104,00
19	Dinas Perikanan	16.517.272.917,18	134.576.216,00	1.970.000,00	16.649.879.133,18
20	Dinas Pertanian	18.728.799.151,55	2.339.772.726,00	7.004.000,00	21.061.567.877,55
21	Sekretariat Daerah	139.004.918.071,02	1.009.460.275,00	1.442.737.408,00	138.571.640.938,02
22	Inspektorat	6.500.689.703,00	67.270.000,00	-	6.567.959.703,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.694.264.883,00	141.476.500,00	4.025.000,00	6.831.716.383,00
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	10.731.041.991,00	206.944.400,00	-	10.937.986.391,00
25	Badan Pendapatan Daerah	7.846.922.900,00	753.824.100,00	45.704.000,00	8.555.043.000,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.228.346.833,00	261.786.050,00	37.611.800,00	5.452.521.083,00
27	Sekretariat Dprd	63.636.509.945,01	234.633.200,00	375.375.000,00	63.495.768.145,01
28	Kecamatan Pringsewu	24.967.127.575,00	10.453.961.000,00	3.450.000,00	35.417.638.575,00
29	Kecamatan Gadingrejo	2.906.038.863,00	29.029.000,00	1.089.000,00	2.933.978.863,00
30	Kecamatan Pagelaran	8.243.761.229,07	28.843.100,00	-	8.272.604.329,07
31	Kecamatan Banyumas	1.951.938.022,00	11.800.000,00	-	1.963.738.022,00
32	Kecamatan Sukoharjo	3.674.369.043,00	1.327.313.000,00	-	5.001.682.043,00
33	Kecamatan Adiluwih	1.865.057.790,00	22.900.000,00	-	1.887.957.790,00
34	Kecamatan Pagelaran Utara	4.177.173.311,00	27.500.000,00	-	4.204.673.311,00
35	Kecamatan Ambarawa	5.921.593.380,00	50.246.573,00	6.385.500,00	5.965.454.453,00
36	Kecamatan Pardasuka	4.943.454.333,00	33.880.000,00	3.080.000,00	4.974.254.333,00
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	686.887.000,00	144.120.150,00	-	831.007.150,00
	JUMLAH	2.861.432.113.137,18	268.800.494.350,85	43.240.717.168,45	3.086.991.890.319,58

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021


No.	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2020	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	521.301.237.712,82	8.252.716.170,00	4.054.472.392,83	525.499.481.489,99
2	Peralatan dan Mesin	294.498.198.972,30	90.311.806.624,00	7.322.625.199,29	377.487.380.397,01
3	Gedung dan Bangunan	736.013.248.109,58	53.079.364.676,82	12.272.204.198,09	776.820.408.588,31
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.238.836.194.024,96	111.165.960.255,03	5.117.762.293,27	1.344.884.391.986,72
5	Aset Tetap Lainnya	55.724.664.432,55	5.240.547.500,00	9.968.000,00	60.955.243.932,55
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.058.569.884,97	750.099.125,00	14.463.685.084,97	1.344.983.925,00
#	JUMLAH	2.861.432.113.137,18	268.800.494.350,85	43.240.717.168,45	3.086.991.890.319,58

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER 31 DESEMBER 2021												
No.	OPD	Saldo Awal	Reklasifikasi								Penghapusan	Saldo Per 31 Desember 2021
			Berkurang				Bertambah					
			Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.058.569.884,97	-	-	14.463.685.084,97	-	-	89.538.900,00	660.560.225,00	-	-	1.344.983.925,00

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	3.035.031.028,00	-	-	3.035.031.028,00
2	Dinas PUPR	4.002.341.600,00	-	4.002.341.600,00	-
3	Dinas Pertanian	48.700.000,00	-	-	48.700.000,00
4	Badan Pendapatan daerah	-	123.970.000,00	-	123.970.000,00
5	PDAM Way Agung	13.403.000,00	-	-	13.403.000,00
Jumlah		7.099.475.628,00	123.970.000,00	4.002.341.600,00	3.221.104.028,00

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	882.624.298,83	67.231.433,55	882.624.298,83	67.231.433,55
2	Utang Belanja	4.167.654.150,00	6.195.873,96	498.025.927,00	3.675.824.096,96
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.248.792.746,25	2.848.750.270,10	9.789.000,00	8.087.754.016,35
Jumlah		10.299.071.195,08	2.922.177.577,61	1.390.439.225,83	11.830.809.546,86

(dalam rupiah)

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2		-	-	-	-
3					
Jumlah		-	-	-	-

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XIX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam rupiah)

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya	Dasar Hukum
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	NIHIL
2.								
3.								
4.								
Jumlah								

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XX.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	BUMD	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17X18
1	Bidang Air Minum					j												
	1. PDAM Way Sekampung		Unaudited	846.684.729,76	6.462.265.230,66	-	7.308.949.960,42	69.208.530,78	-	69.208.530,78	-	-	-	-	-	7.239.741.430,28	100%	7.239.741.430,28
	Sub Total			846.684.729,76	6.462.265.230,66	-	7.308.949.960,42	69.208.530,78	-	69.208.530,78	-	-	-	-	-	7.239.741.430,28	100%	7.239.741.430,28
	Total Seluruh Bidang Industri			846.684.729,76	6.462.265.230,66	-	7.308.949.960,42	69.208.530,78	-	69.208.530,78	-	-	-	-	-	7.239.741.430,28	100%	7.239.741.430,28

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XX.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	BUMD	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Air Minum								
	1. PDAM Way Sekampung		Unaudited	1.068.095.237,00	1.446.061.272,00	(377.966.035,00)	4.731.504,00	-	(373.234.531,0)
	Sub Total			1.068.095.237,00	1.446.061.272,00	(377.966.035,00)	4.731.504,00	-	(373.234.531,0)
	Total Seluruh Bidang Industri			1.068.095.237,00	1.446.061.272,00	(377.966.035,00)	4.731.504,00	-	(373.234.531,0)

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH